



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2017 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 27/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 56/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2017.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan desa.

Pasal 3

Tujuan pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa

BAB III

PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan ketentuan.
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa masing-masing.
- (2) Ketentuan penghitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa yaitu:
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) bagi hasil pajak dan retribusi dibagi secara merata sejumlah desa dengan rumusan:

$$\frac{10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- b. 40 % (empat puluh perseratus) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing masing desa dibagi total pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Jombang.

$$10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Kabupaten}}$$

- (3) Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diprioritaskan penggunaannya untuk :

- a. Infrastruktur jalan; dan/atau
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.

BAB VII
TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I, sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
- b. Tahap II, sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

BAB VIII
MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pasal 10

Mekanisme pengajuan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 1. Tahap I :
 - a) Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - b) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - c) Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - d) Pakta Integritas dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6000,00; dan
 - e) Kwitansi/bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai Rp.6000.00.
 2. Tahap II :
 - a) Laporan realisasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I;
 - b) Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
 - c) Kwitansi/bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai Rp.6000.00.
- b. Camat menverifikasi persyaratan berkas pengajuan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Camat mengajukan berkas pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Badan dengan tembusan Dinas.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan terhadap penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 23/E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR : 23 TAHUN 2017****TANGGAL : 23 Maret 2017****PENETAPAN BESARAN PEROLEHAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2017**

No	KECAMATAN	DESA	BESARAN PDRD 2017
1	2	3	4
1	PERAK	JATIGANGGONG	41,054,445.34
2	PERAK	KEPUHKAJANG	49,437,644.65
3	PERAK	SUMBERAGUNG	41,809,940.52
4	PERAK	PAGERWOJO	44,215,842.63
5	PERAK	PERAK	40,991,516.90
6	PERAK	SEMBUNG	39,809,156.43
7	PERAK	GLAGAHAN	43,223,012.46
8	PERAK	KALANG SEMANDING	41,445,451.12
9	PERAK	GADINGMANGU	41,502,572.80
10	PERAK	PLOSOGENUK	39,974,598.60
11	PERAK	SUKOREJO	45,810,655.81
12	PERAK	TEMUWULAN	39,001,881.19
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	47,827,548.81
14	GUDO	PUCANGRO	52,560,344.64
15	GUDO	KEDUNGTURI	40,626,156.93
16	GUDO	JAPANAN	33,258,358.75
17	GUDO	BLIMBING	34,777,264.52
18	GUDO	MENTAOS	36,998,587.87
19	GUDO	SUKOIBER	45,048,774.43
20	GUDO	SUKOPINGGIR	40,646,118.46
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	45,417,163.11
22	GUDO	GUDO	35,186,643.42
23	GUDO	PESANGGRAHAN	34,918,590.11
24	GUDO	WANGKALKEPUH	36,879,437.55
25	GUDO	KREMBANGAN	45,226,480.82
26	GUDO	SEPANYUL	43,677,379.53
27	GUDO	GODONG	42,287,946.21
28	GUDO	MEJOYOLOSARI	37,695,602.58
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	43,341,726.09
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	45,262,085.60
31	GUDO	TANGGUNGAN	43,244,628.28
32	NGORO	JOMBOK	45,571,438.20
33	NGORO	GENUKWATU	46,017,474.94
34	NGORO	REJOAGUNG	48,353,524.47
35	NGORO	KAUMAN	39,535,142.59
36	NGORO	NGORO	46,178,561.66
37	NGORO	BADANG	46,290,912.40
38	NGORO	PULOREJO	55,022,597.02
39	NGORO	BANYUARANG	46,935,166.78
40	NGORO	SIDOWAREK	52,124,411.43
41	NGORO	GAJAH	43,820,475.50
42	NGORO	KESAMBEN	46,143,035.30
43	NGORO	KERTOREJO	41,859,887.16
44	NGORO	SUGIHWARAS	44,503,673.46
45	BARENG	KEBONDALEM	43,046,319.40
46	BARENG	MUNDUSEWU	44,280,829.75
47	BARENG	PAKEL	39,245,798.94
48	BARENG	KARANGAN	44,092,587.23
49	BARENG	NGAMPUNGAN	42,915,954.32
50	BARENG	JENISGELARAN	47,655,455.17
51	BARENG	BARENG	68,006,317.56
52	BARENG	TEBEL	39,084,715.04
53	BARENG	MOJOTENGAH	40,384,411.64
54	BARENG	BANJARAGUNG	53,328,147.34
55	BARENG	NGLEBAK	45,893,236.20
56	BARENG	NGRIMBI	45,716,177.43
57	BARENG	PULOSARI	49,900,779.78

58	WONOSALAM	GALENGDOWO	43,225,088.06
59	WONOSALAM	WONOMERTO	40,114,727.12
60	WONOSALAM	JARAK	48,568,205.97
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	43,467,039.14
62	WONOSALAM	WONOSALAM	69,718,592.96
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	52,662,928.60
64	WONOSALAM	WONOKERTO	37,856,995.04
65	WONOSALAM	SUMBERJO	43,786,214.13
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	42,866,891.33
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	41,285,193.46
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	51,487,338.74
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	40,678,651.24
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	46,412,722.89
71	MOJOAGUNG	JANTI	37,510,748.07
72	MOJOAGUNG	TEJO	50,561,696.11
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	34,950,860.20
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	30,555,806.74
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	38,582,993.58
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	44,189,386.22
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	43,448,428.44
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	36,660,130.99
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	50,808,966.51
80	MOJOAGUNG	BETEK	45,725,872.70
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	41,905,379.95
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	38,908,549.14
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	42,834,054.61
84	MOJOAGUNG	SEKETI	28,970,005.59
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	42,375,972.27
86	MOJOWARNO	KARANGLO	38,128,392.27
87	MOJOWARNO	LATSARI	35,882,748.34
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	38,823,789.86
89	MOJOWARNO	PENGGARON	35,263,522.90
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	42,104,145.77
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	38,576,655.30
92	MOJOWARNO	GONDEK	40,236,711.37
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	35,626,011.79
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	36,739,685.25
95	MOJOWARNO	JAPANAN	40,681,089.47
96	MOJOWARNO	MENGANTO	36,078,707.66
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	36,906,663.30
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	40,012,833.06
99	MOJOWARNO	SELOREJO	36,925,153.55
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	37,849,237.23
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	32,799,446.06
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	43,159,974.34
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	37,889,384.04
104	DIWEK	KAYANGAN	43,007,676.94
105	DIWEK	PUTON	37,844,603.46
106	DIWEK	BENDET	33,565,229.29
107	DIWEK	BULUREJO	47,908,953.39
108	DIWEK	GROGOL	49,651,697.50
109	DIWEK	JATIREJO	37,704,464.18
110	DIWEK	CUKIR	45,387,859.96
111	DIWEK	KWARON	41,850,834.12
112	DIWEK	WATUGALUH	38,012,365.73
113	DIWEK	PUNDONG	44,683,286.82
114	DIWEK	DIWEK	32,860,615.40
115	DIWEK	BANDUNG	48,269,747.77
116	DIWEK	KEDAWONG	32,223,617.55
117	DIWEK	NGUDIREJO	37,087,797.16
118	DIWEK	CEWENG	37,606,884.31
119	DIWEK	BALONGBESUK	41,801,812.39
120	DIWEK	PANDANWANGI	43,223,221.33
121	DIWEK	BRAMBANG	33,123,754.57
122	DIWEK	JATIPELEM	36,650,888.56
123	DIWEK	KERAS	47,766,703.14

124	JOMBANG	MOJONGAPIT	43,413,445.39
125	JOMBANG	PLANDI	43,481,110.63
126	JOMBANG	KEPATIHAN	46,297,187.64
127	JOMBANG	PULOLOR	50,814,493.16
128	JOMBANG	SENGON	47,000,829.20
129	JOMBANG	TUNGGORONO	39,196,266.70
130	JOMBANG	DENANYAR	53,632,770.32
131	JOMBANG	JOMBANG	63,372,208.21
132	JOMBANG	CANDIMULYO	43,939,779.33
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	34,341,228.29
134	JOMBANG	BANJARDOWO	42,573,149.68
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	47,059,062.10
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	37,993,644.58
137	JOMBANG	JABON	39,868,563.34
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	37,646,428.61
139	JOMBANG	SUMBERJO	32,684,848.53
140	PETERONGAN	PETERONGAN	44,524,670.37
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	39,583,166.64
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	54,678,822.11
143	PETERONGAN	MANCAR	48,585,002.98
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	48,223,222.70
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	46,812,262.23
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	36,709,280.87
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	41,125,236.66
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	38,871,936.92
149	PETERONGAN	BONGKOT	41,592,472.25
150	PETERONGAN	SENDEN	34,911,514.26
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	45,412,059.83
152	PETERONGAN	TENGERAN	39,902,717.59
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	38,917,916.89
154	SUMOBITO	PLOSOKEREPI	44,309,893.53
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	48,554,011.21
156	SUMOBITO	PALREJO	47,163,005.36
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	46,459,821.77
158	SUMOBITO	BRUDU	49,566,097.63
159	SUMOBITO	BADAS	47,168,065.84
160	SUMOBITO	NGLELE	39,358,295.25
161	SUMOBITO	TRAWASAN	40,731,934.89
162	SUMOBITO	SEBANI	42,749,809.43
163	SUMOBITO	MLARAS	42,366,069.66
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	42,528,375.51
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	45,572,733.95
166	SUMOBITO	SUMOBITO	41,393,632.10
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	55,830,032.69
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	48,359,934.51
169	SUMOBITO	KENDALSARI	48,512,099.92
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	38,970,577.78
171	SUMOBITO	MADIOPURO	39,085,899.56
172	SUMOBITO	BAKALAN	38,015,672.24
173	SUMOBITO	GEDANGAN	44,397,442.14
174	SUMOBITO	MENTURO	43,549,929.37
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	51,570,193.61
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	41,392,578.28
177	KESAMBEN	WATUDAKON	49,124,150.08
178	KESAMBEN	CARANGREJO	47,050,052.37
179	KESAMBEN	JOMBOK	57,113,008.40
180	KESAMBEN	BLIMBING	41,913,575.48
181	KESAMBEN	WULUH	42,339,649.39
182	KESAMBEN	POJOKREJO	52,283,596.57
183	KESAMBEN	KESAMBEN	44,526,259.04
184	KESAMBEN	PODOROTO	50,003,287.11
185	KESAMBEN	JOMBATAN	50,879,182.74
186	KESAMBEN	POJOKKULON	39,965,647.56
187	KESAMBEN	GUMULAN	37,852,990.18
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	36,319,632.34

189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	49,339,851.82
190	TEMBELANG	PESANTREN	39,535,508.05
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	39,795,916.30
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	35,617,163.00
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	40,299,314.85
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	40,674,399.32
195	TEMBELANG	TEMBELANG	36,677,355.47
196	TEMBELANG	SENTUL	39,457,016.32
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	32,116,555.63
198	TEMBELANG	PULOREJO	42,948,263.88
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	47,096,224.80
200	TEMBELANG	JATIWATES	44,270,151.90
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	35,497,720.52
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	36,993,851.07
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	33,114,728.18
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	38,902,877.18
205	PLOSO	REJOAGUNG	43,995,436.38
206	PLOSO	LOSARI	32,925,962.34
207	PLOSO	PLOSO	35,779,990.62
208	PLOSO	JATIGEDONG	45,623,547.33
209	PLOSO	DADITUNGGAL	31,449,585.49
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	31,595,874.69
211	PLOSO	JATIBANJAR	37,285,199.84
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	33,582,449.93
213	PLOSO	PANDANBOLE	29,512,497.39
214	PLOSO	KEDUNGOWO	33,887,219.75
215	PLOSO	KEBONAGUNG	30,978,922.69
216	PLOSO	BAWANGAN	30,491,588.45
217	PLANDAAN	KLITIH	32,206,995.07
218	PLANDAAN	PLABUHAN	33,774,706.53
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	34,242,882.41
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	36,031,715.40
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	35,968,423.81
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	41,172,567.73
223	PLANDAAN	PLANDAAN	37,148,128.47
224	PLANDAAN	BANGSRI	37,899,086.24
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	40,994,220.39
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	36,407,241.69
227	PLANDAAN	DARUREJO	44,717,147.89
228	PLANDAAN	SUMBERJO	34,323,773.15
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	28,939,054.57
230	KABUH	MARMOYO	28,206,212.89
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	33,869,518.85
232	KABUH	MANGUNAN	38,441,493.46
233	KABUH	KABUH	41,523,538.95
234	KABUH	KEDUNGJATI	34,779,832.17
235	KABUH	BANJARDOWO	33,452,762.97
236	KABUH	KARANGPAKIS	45,223,955.19
237	KABUH	SUMBERINGIN	32,759,659.84
238	KABUH	SUMBERGONDANG	37,931,411.94
239	KABUH	KAUMAN	34,999,106.44
240	KABUH	MUNUNGKEREK	31,835,665.33
241	KABUH	GENENGANJASEM	33,016,139.35
242	KABUH	MANDURO	36,356,167.67
243	KABUH	SUKODADI	38,964,892.50
244	KABUH	PENGAMPON	35,385,877.72
245	KABUH	SUMBERAJI	29,155,951.09
246	KUDU	SIDOKATON	32,915,346.77
247	KUDU	TAPEN	36,512,791.31
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	36,836,279.46
249	KUDU	RANDUWATANG	33,792,802.62
250	KUDU	SUMBERTEGUH	37,512,476.15
251	KUDU	MENTURUS	33,057,784.62
252	KUDU	KUDUBANJAR	36,713,663.49
253	KUDU	MADE	30,535,201.43
254	KUDU	KEPUHREJO	32,082,791.96
255	KUDU	BENDUNGAN	33,870,216.95
256	KUDU	KATEMAS	38,715,975.77

257	BANDAR KEDUNGMULYO	BANDAR KEDUNGMULYO	40,816,214.92
258	BANDAR KEDUNGMULYO	MOJOKAMBANG	33,934,789.67
259	BANDAR KEDUNGMULYO	BARONGSAWAHAN	40,196,761.64
260	BANDAR KEDUNGMULYO	KAYEN	50,861,492.85
261	BANDAR KEDUNGMULYO	GONDANGMANIS	39,299,039.54
262	BANDAR KEDUNGMULYO	BRODOT	37,800,056.09
263	BANDAR KEDUNGMULYO	PUCANGSIMO	44,083,236.40
264	BANDAR KEDUNGMULYO	BANJARSARI	38,309,150.17
265	BANDAR KEDUNGMULYO	BRANGKAL	47,125,366.75
266	BANDAR KEDUNGMULYO	KARANGDAGANGAN	43,720,603.22
267	BANDAR KEDUNGMULYO	TINGGAR	45,445,344.27
268	JOGOROTO	JOGOROTO	57,841,867.26
269	JOGOROTO	JARAKKULON	34,761,600.00
270	JOGOROTO	ALANG-ALANGCARUBAN	41,182,007.50
271	JOGOROTO	SUKOSARI	41,495,943.89
272	JOGOROTO	SAWIJI	42,772,867.84
273	JOGOROTO	MAYANGAN	43,522,071.63
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	48,861,952.22
275	JOGOROTO	NGUMPUL	46,125,642.95
276	JOGOROTO	TAMBAR	34,218,321.44
277	JOGOROTO	JANTI	39,078,717.61
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	41,690,592.09
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	41,665,880.43
280	MEGALUH	GONGSENG	45,841,319.29
281	MEGALUH	MEGALUH	42,391,151.14
282	MEGALUH	SUDIMORO	42,956,467.10
283	MEGALUH	BALONGSARI	44,132,988.27
284	MEGALUH	SUMBERSARI	39,078,476.96
285	MEGALUH	NGOGRI	47,044,468.57
286	MEGALUH	SIDOMULYO	43,773,208.50
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	37,818,089.39
288	MEGALUH	DUKHARUM	34,643,337.94
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	39,379,330.34
290	MEGALUH	PACARPELUK	35,424,457.90
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	37,414,022.12
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	34,025,396.71
293	NGUSIKAN	KEBOAN	37,366,711.04
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	33,113,798.91
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	38,188,020.35
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	39,633,811.39
297	NGUSIKAN	CUPAK	26,597,894.84
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	33,480,868.78
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	28,816,080.06
300	NGUSIKAN	MOJODANU	28,221,841.78
301	NGUSIKAN	KROMONG	25,978,013.07
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	26,462,423.42
JUMLAH			12,371,552,958.98

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

